

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu pengukuran dan gambaran kondisi suatu negara maupun daerah. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan Indeks pembangunan manusia tinggi dapat dikatakan bahwa negara tersebut sudah sejahtera, artinya pendapatan dan pembangunan ekonomi merata. Namun yang terjadi di negara Indonesia, pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun 2011 (6,5%), 2012 (6,23), 2013 (dibawah 6%). IPM Indonesia bergerak secara signifikan, terjadi peningkatan IPM dari tahun 2009 sampai 2013. Hal ini menandakan indikator IPM sudah tercapai secara nasional, namun belum tercapai dengan baik secara regional.

Pulau Kalimantan terdiri dari 55 kabupaten/kota, dengan nilai dan tingkatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Ada kesenjangan yang cukup jauh dari nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah dan bernilai negatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah. Beberapa kabupaten/kota berbatasan langsung dengan negara Malaysia, ada pendapat yang mengatakan bahwa daerah perbatasan merupakan halaman belakang suatu negara. Sehingga daerah perbatasan jauh dari perhatian pemerintah. Hal ini perlu di perhatikan dengan baik, karena daerah

perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Perlu adanya pengeluaran pemerintah yang alokatif dan distributif agar tercipta pembangunan infrastruktur yang baik dan pemertaaan pembangunan, yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan Indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah dan bagian dari kebijakan publik yang ditetapkan bersama-sama dengan DPR/DPRD. Kegiatan ini mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membeli barang dan jasa untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah.

Tabel 1.1

**Kondisi Perekonomian Provinsi di Pulau Kalimantan
Tahun 2009-2013**

Provinsi	2009	2010	2011¹⁾	2012¹⁾	2013¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kalimantan Barat	4,80	5,47	5,59	5,83	6,08
2. Kalimantan Tengah	5,57	6,50	6,77	6,69	7,37
3. Kalimantan Selatan	5,29	5,59	6,12	5,73	5,18
4. Kalimantan Timur	2,28	5,1	4,08	3,98	1,59
Kalimantan	3,47	5,38	4,97	4,83	3,49
33 Provinsi	5,41	6,14	6,35	6,28	5,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, disesuaikan

Jika dilihat secara keseluruhan kondisi perekonomian setiap provinsi di Pulau Kalimantan tumbuh secara signifikan, artinya dari tahun ke tahun terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan

disetiap provinsi yang diakibatkan oleh krisis keuangan ekonomi di Indonesia sehingga beberapa provinsi mengalami dampaknya. Hal ini juga disebabkan karena kontraksi pada ekspor cukup tajam. Kontribusi pertumbuhan ekonomi Kalimantan berada pada urutan ketiga, setelah Jawa dan Sumatera.

Fungsi pemerintah menurut Dumairy (1996) adalah alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif, pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Pengeluaran pemerintah atau disebut juga belanja Negara yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal, seperti pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Pengeluaran Negara Tahun 2009- 2013
(Dalam Milyar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ²⁾
I. Belanja Pemerintah Pusat	628,812	697,406	883,722	1,010,558	1,196,828
Belanja Pegawai	127,670	148,078	175,738	197,864	232,979
Belanja Barang	80,668	97,597	124,640	140,885	206,507
Belanja Modal	75,871	80,287	117,855	145,104	192,600
Pembayaran Bunga Utang	93,782	88,383	93,262	100,516	112,518
Utang Dalam Negeri	63,756	61,480	66,825	70,211	96,759
Utang Luar Negeri	30,026	26,903	26,437	30,305	15,759
Subsidi	138,082	192,707	295,358	346,420	348,119
Energi	94,586	139,953	255,609	306,478	299,830
Non Energi	43,496	52,754	39,749	39,942	48,289
Belanja Hibah	0	70	300	75	2,346
Bantuan Sosial	73,813	68,611	71,104	75,621	82,488
Belanja Lain-lain	38,926	21,673	5,465	4,073	19,271
II. Transfer ke Daerah	308,585	344,728	411,325	480,645	529,363
Dana Perimbangan	287,251	316,712	347,246	411,293	445,531
Dana Bagi Hasil	76,130	92,184	96,909	111,537	102,695
Dana Alokasi Umum	186,414	203,572	225,534	273,814	311,139
Dana Alokasi Khusus	24,707	20,956	24,803	25,942	31,697
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	21,334	28,016	64,079	69,352	83,832
III. Suspen	-15	-17	-48	207	0
Jumlah	937,382	1,042,117	1,294,999	1,491,410	1,726,191

Sumber : Departemen Keuangan (DJPK)

Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam peningkatan pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena menyangkut produktivitas dan mobilitas kegiatan ekonomi baik nasional maupun daerah. Pembentukan modal bidang perumahan dan fasilitas umum menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, dan tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Ketersediaan berbagai fasilitas publik dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Ketersediaan perumahan dan fasilitas umum yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik serta dapat mendukung kesehatan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Jaringan transportasi yang baik tentu akan melancarkan mobilitas penduduk, distribusi barang dan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produktif dan dalam jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan.

Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan untuk ketiga sektor tersebut. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas modal manusia dan prasarana fisik sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.3
Proporsi Pengeluaran Pemerintah bidang Perumahan dan Pelayanan Publik,
Pendidikan dan Kesehatan Di Provinsi Di Pulau Kalimantan
Tahun 2009-2013 (Dalam Persen)

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas umum	Pendidikan	Kesehatan
1	Kalimantan Barat			
	2008	20.2	5.8	10.2
	2009	14.4	7.1	10.3
	2010	16.9	5.4	11.0
	2011	16.9	5.0	12.3
	2012	16.6	3.0	8.0
	2013	19.3	3.9	8.9
2	Kalimantan Tengah			
	2008	33.3	8.1	6.5
	2009	25.2	14.7	6.2
	2010	22.3	11.7	5.0
	2011	16.3	14.1	8.3
	2012	16.7	9.7	6.7
	2013	22.3	8.4	7.4
3	Kalimantan Selatan			
	2008	11.4	8.9	13.9
	2009	12.1	13.1	12.5
	2010	14.8	14.7	11.1
	2011	12.5	14.5	14.9
	2012	10.4	40.8	12.7
	2013	13.9	8.9	15.8
4	Kalimantan Timur			
	2008	11.3	8.4	8.7
	2009	16.5	7.9	11.2
	2010	15.7	6.5	11.0
	2011	19.8	5.0	9.4
	2012	26.3	3.7	7.7
	2013	20.3	6.2	9.0

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK), diolah, 2015

Pada Tabel 1.3 di atas persentase untuk perumahan dan pelayanan umum lebih besar dibanding bidang pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dananya dialokasikan untuk pembangunan rumah nasional, air, listrik, dan jalan serta sarana dan prasarana publik. Pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan dialokasikan untuk dana bantuan sekolah dan fasilitas penunjang peningkatan mutu pendidikan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dialokasikan untuk pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, jaminan kesehatan bagi rakyat miskin, sarana serta prasarana kesehatan.

Tabel 1.4

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2009-2013 (%)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kalimantan Barat	68,79	69,15	69,66	70,31	70,93
2. Kalimantan Tengah	74,36	74,64	75,06	75,46	75,68
3. Kalimantan Selatan	69,30	69,92	70,44	71,08	71,74
4. Kalimantan Timur	75,11	75,56	76,22	76,71	77,33
33 Provinsi	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), disesuaikan

Jika dilihat pada Tabel 1.3 kondisi IPM setiap provinsi di Pulau Kalimantan tumbuh secara signifikan. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan komponen-komponen dasar kualitas hidup. Komponen tersebut mencakup kesehatan, pendidikan dan kelayakan hidup. Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai IPM 77,33% berada pada urutan ke 4 nasional setelah Sulawesi Utara, kemudian diikuti Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 75,68% berada pada urutan ke 7 nasional. Kedua Provinsi ini memiliki nilai IPM di atas IPM nasional. Sedangkan 2 provinsi masih berada pada nilai IPM dibawah nilai IPM nasional, yaitu Kalimantan Selatan dengan nilai 71,74% berada pada urutan ke 26 nasional dan

IPM terendah di Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Barat 70,93% berada pada urutan ke 29 nasional setelah Provinsi Sulawesi Barat.

Agar tercipta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kebijakan pemerintah yang adil (*equity*) : kebijakan pemerintah yang tidak berat sebelah, b. Efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) : efisiensi ekonomi ada, apabila kebijakan ekonomi lebih baik dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini keadilan pemerintah dalam membuat kebijakan, belum secara menyeluruh menyentuh setiap daerah di wilayahnya. Dapat dilihat dari ketimpangan yang dialami beberapa kabupaten/kota di Pulau Kalimantan.

Pengelolaan wilayah perbatasan selama ini belum terintegrasi dengan baik. Pulau Kalimantan memiliki wilayah perbatasan di 8 daerah kabupaten yaitu : Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Bengkayang, Nunukan, Kutai Barat, Malinau. Dari 8 kabupaten tersebut hanya Entikong (Kabupaten Sanggau) dan Kabupaten Nunukan yang kondisinya sudah cukup baik, baik itu kondisi wilayah maupun kondisi *Custom, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS). Potensi sumber daya alam wilayah perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi tinggi. Namun rendahnya perhatian pemerintah dan pengawasan dan berdampak terhadap terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah pada umumnya akan berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran atas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, merupakan bidang pengeluaran yang sangat penting bagi proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan ?
2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan ?
3. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan ?
4. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama periode 2009 -2013

2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama periode 2009 -2013
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama periode 2009 -2013
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama periode 2009 -2013

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberi gambaran pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama periode 2009 -2013.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan institusi terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBN.
3. Sebagai gambaran bagi penulis dan pembaca untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian pulau Kalimantan pada tahun yang bersangkutan dan melihat kemajuan di tahun berikutnya untuk menambah informasi dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.